

**EVALUASI DAMPAK SOSIAL BANTUAN PERUMAHAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2010-2015**

Oleh :

Danang Rifkianto Wibowo, R. Slamet Santoso

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*Prembun is one of the sub-districts targeted by housing assistance programs for the poor with the largest allocation of aid funds in Kebumen regency. The study was aimed to find out about the results of the implementation of Housing Assistance the poor and the social impact of implementing the Housing Assistance for the Poor in Prembun District. Evaluation theory by William N. Dunn was used to answer the research problems and objectives related to the results of the implementation of the housing assistance. The evaluation consists of six criteria; efficiency, effectiveness, adequacy, evenness, responsiveness and accuracy. Meanwhile, to answer the social impacts that occurred, the theory of Social Impact Analysis was used. The affected social units discussed were individual impacts, organizational impacts, community impacts, the impact of social institutions and systems. The result of the study indicates that there were still many deficiencies in the Housing Assistance for the Poor in Prembun sub-district in Kebumen Regency. It can be seen from the results of the assistance that was not optimal. The obstacles were the executor team's lack of understanding in the procedures for implementing the assistance, lack of participation from the community and misuse of the assistance from the poor who need help. Other problems arise related to the social impact of the assistance, such as; the lack of community self-reliance in overcoming uninhabitable houses, the lack of community awareness of the condition of uninhabitable houses and the insignificant impact of the assistance on the social interaction of the community. The result of the study is very important to be considered in the evaluation for the next Housing Assistance for the Poor Program. This recommendation is expected to help relevant agencies to improve the results of the implementation and the achievement of program objectives.*

*Keywords: evaluation, housing assistance, poor, social*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah-masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan tahunan yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Kebutuhan non-makanan yang dimaksud meliputi kebutuhan akan perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta kebutuhan akan barang dan jasa lainnya.

Pemenuhan akan kebutuhan dasar atau *basic needs* merupakan suatu hal yang harus segera dipenuhi. Hal ini dapat dimengerti dari definisi Midgley (Nurhadi, 2007 : 46) bahwa kondisi kesejahteraan diciptakan atas kompromi tiga elemen, yaitu:

(1) sejauhmana masalah-masalah sosial diatur, (2) sejauhmana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, (3) sejauhmana

kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan.

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh kesejahteraan sosial adalah pemenuhan kebutuhan akan rumah. Pemenuhan kebutuhan akan papan atau rumah merupakan hak setiap warga negara, yang telah terjamin di dalam UUD 1945 (yang diamandemen) pada pasal 28 ayat 1 dimana pada pasal ini menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Namun pada kenyataannya jika berpedoman pada data BPS tentang kemiskinan tercatat bahwa pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 28.070.000 jiwa dan meningkat pada tahun 2014 sebesar 28.280.000 jiwa dengan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 3,4 juta unit pada tahun 2013 menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tingginya tingkat kemiskinan cukup merata tersebar diseluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sendiri menurut data dari BPS tentang kemiskinan pada tahun 2013 berjumlah 4.834.950 jiwa dan 4.836.450 jiwa pada tahun 2014 dengan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 1,7 juta unit rumah.

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah pada tahun 2013 bahwa terdapat beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. Salah satunya adalah Kabupaten Kebumen dengan nilai persentase kemiskinan mencapai 21,32 persen pada tahun 2013.

Dalam rangka mengatasi tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah sehat layak huni, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang bantuan perumahan masyarakat miskin melalui Permenpera No. 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah dengan nama kegiatan berupa BSPS. Selanjutnya dalam rangka menekan angka kemiskinan yang berkaitan dengan perumahan rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011. Kabupaten Kebumen sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah tidak luput dari program percepatan penanggulangan kemiskinan tentang perumahan masyarakat miskin dengan dikeluarkan Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2011 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen dengan nama kegiatan berupa P2MKM. Jenis kegiatan yang sama-sama bersifat swadaya masyarakat melalui kegiatan gotong-royong serta besaran nominal pendanaan yang sama ini yang akhirnya menjadi dasar disatukannya kegiatan yang mengatur tentang pemenuhan rumah sehat layak huni bersifat swadaya menjadi Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin sebagai nama program.

Menurut pendataan yang telah dilakukan oleh Bapermades Kabupaten Kebumen ditemukan bahwa jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Kebumen sebanyak 14.428 unit rumah dimana data ini diperoleh dari tahun 2010 hingga 2012 dikarenakan jumlah rumah tidak layak huni selalu berubah seiring dilakukannya survei di lapangan sehingga untuk mendapatkan jumlah yang pasti maka pada tahun 2012 ditetapkan sebagai tahun akhir penetapan jumlah rumah tidak layak huni, yang mana target diharapkan terselesaikan di tahun 2015.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), diperoleh data bahwa pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin yang dilaksanakan mulai tahun 2010 hingga 2015 telah menghasilkan *output* berupa rumah layak huni sebesar 12.655 unit rumah sampai

dengan tahun 2014. Meskipun hasil dari pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin telah mencapai hasil yang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan seperti adanya penerima ganda, rekening kosong, hingga penerima bantuan yang pindah ke daerah lain sehingga pelaksanaan bantuan tidak dapat dilanjutkan. Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hasil pelaksanaan serta dampak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin terlebih misi bantuan perumahan masyarakat miskin yang menitikberatkan pada dampak sosial kemasyarakatan seperti:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu;
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengatasi rumah tidak layak huni;
3. Memperkuat potensi pemerintah desa dalam permasalahan rumah tidak layak huni;
4. Menumbuhkembangkan semangat gotong-royong;
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Selanjutnya dalam rangka mengerucutkan lokus penelitian peneliti

menetapkan Kecamatan Prembun sebagai lokus penelitian dengan dasar pertimbangan nilai penerimaan dana bantuan di Kecamatan Prembun memiliki besaran persentase nilai yang hampir sama dengan besaran persentase di tingkat Kabupaten yang dibagi atas tiga sumber dana yaitu APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten yaitu sebesar 78,59% berasal dari APBN, 1,96% berasal dari APBD Prov, dan 19,45% berasal dari APBD Kabupaten. Selain berpedoman pada hal tersebut daya jangkau peneliti menjadi dasar pertimbangan lain penetapan Kecamatan Prembun sebagai lokus penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hasil pelaksanaan Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun?
2. Bagaimana dampak sosial Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penyusunan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan :

1. Mengetahui hasil pelaksanaan Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun.
2. Mendeskripsikan dampak sosial Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun.

## **D. Landasan Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern.

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus Administrasi publik yaitu (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah terutama pekerjaan sehari-hari pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya yang memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

### **2. Kebijakan Publik**

Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Menurut Presman dan Wildavsky, kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

### **3. Evaluasi Kebijakan**

Menurut Rossi dan Freeman evaluasi berkaitan dengan penelitian sosial mengenai konsepsialisasi dan pendesainan implementasi dan pemanfaatan program intervensi sosial yang dilakukan oleh pemerintah.

Lester dan Stewart menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu tugas *pertama* adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas *kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan *standard* atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **4. Kriteria Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dalam rangka meneliti tentang efektif tidaknya

kegiatan berjalan, sekaligus mencaritahu segala bentuk peluang dan hambatan yang terdapat di lapangan yang mana dalam prosesnya didasarkan pada standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengikuti William N. Dunn, secara umum Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut (William N. Dunn, 2000: 610)

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan

antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha misalnya (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Ketepatan kriteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

## **5. Evaluasi Dampak Kebijakan**

Menurut Samudra Wibawa (1994 : 29) evaluasi dampak merupakan evaluasi yang mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan.

Evaluasi dampak dalam penelitian yang dilakukan membahas mengenai dampak sosial yang terjadi pada bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun maka dalam penelitian ini digunakan Analisis Dampak Sosial (ADS) dalam menjelaskan fenomena dampak yang terjadi di masyarakat. Analisis Dampak Sosial harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sah atau dengan kata lain ADS harus dilakukan secara logika-empiris. Merujuk pada ADS terdapat unit-unit sosial pedampak, unit-unit sosial tersebut di antaranya yaitu;

Dampak Individu, dampak ini dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal.

Dampak Organisasi, dampak yang langsung terhadap organisasi adalah berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam

mencapai tujuannya, sementara dampak tak langsung dapat berupa pengaruh terhadap karyawan.

Dampak terhadap Masyarakat, dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauhmana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.

Dampak Lembaga dan Sistem Sosial, Perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial merupakan akibat dari banyak faktor, bukan hanya merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan. Menurut pendekatan ini, seandainya sistem sosial tertuntut untuk melakukan perubahan struktural, nilai dasar dan organisasi masyarakatnya tetap akan dijaga. Sementara itu teori konflik melihat perubahan sistem sosial sebagai respon terhadap kelompok-kelompok penting dalam masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Prembun. Informan pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi serta telaah dokumen. Data yang sudah

dianalisis dan interpretasi data melalui reduksi dengan mengelompokkan hal-hal pokok, kemudian disajikan dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan lainnya untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Pelaksanaan Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun**

#### **1. Efektivitas**

“Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang sangat dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter” (Dunn, 2000: 429).

Kriteria efektivitas hasil penelitian menerangkan bahwa hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian hasil pelaksanaan bantuan berupa rumah layak huni di Kecamatan Prembun

yang telah berhasil dipugar berjumlah 509 sampai dengan tahun 2014 dengan sisa mendesak untuk ditangani berjumlah 196 unit rumah.

Sesuai teori yang peneliti gunakan bahwa hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun telah memiliki tingkat efektivitas tinggi selain dilihat dari besaran *output* bantuan, kesesuaian prosedur pelaksanaan dengan penerapan dilapangan juga menjadi faktor yang disorot pada kriteria efektivitas. Tercapainya 3 dari 5 tujuan terselenggaranya bantuan juga menjadi faktor hasil pelaksanaan bantuan telah mencapai tingkat efektivitas yang cukup baik.

#### **2. Efisiensi**

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter” (Dunn 2000: 430).

Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil pelaksanaan bantuan pada kriteria efisiensi dapat dikatakan baik. Hal ini dapat diketahui dari besaran nominal swadaya masyarakat yang selalu lebih besar dari besaran nilai bantuan



pemerintah. Meskipun bantuan bersifat stimulan dengan nominal anggaran dari pemerintah terbatas hal ini tidak membuat tingkat efektivitas berupa *output* bantuan terganggu. Usaha pemanfaatan bahan material lama guna mendukung pelaksanaan bantuan agar sesuai dengan standar bangunan yang ditetapkan menjadi faktor hasil pelaksanaan bantuan dikatakan efisien.

### **3. Kecukupan**

“Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan” (Dunn 2000 : 430).

Kriteria kecukupan pada hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin membahas tentang bagaimana tim pelaksana bantuan dalam memaksimalkan tingkat efektivitas dengan biaya tetap. Hasil pelaksanaan bantuan pada kriteria efektivitas belum dapat dikatakan baik. Hal ini dapat diketahui dari pemahaman tim pelaksana yang masih sering salah dalam penyusunan proposal, tidak adanya upaya tim pelaksana bantuan dalam menggerakkan masyarakat sekitar agar turut serta

dalam membantu pelaksanaan bantuan serta tidak adanya pemberian saran bentuk rumah yang sehat layak huni. Kondisi seperti ini pada akhirnya berimbas pada minimnya pengetahuan masyarakat dalam memahami pentingnya rumah sehat layak huni.

Hal ini berarti bahwa bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun belum memenuhi kriteria kecukupan, terlihat dari minimnya pengetahuan tim pelaksana dalam memaksimalkan hasil pelaksanaan bantuan melalui pelibatan masyarakat serta pemberian saran tentang pentingnya bentuk rumah sehat layak huni.

### **4. Perataan**

“Kriteria perataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usahanya didistribusikan secara adil” (Dunn 2000 : 434).

Kriteria perataan pada hasil pelaksanaan bantuan dilihat dari pemerataan alokasi anggaran dana bantuan terhadap lokasi daerah penerima bantuan.

Hasil penelitian pada kriteria perataan sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat di mengerti dengan tidak adanya penerima bantuan yang mendapatkan double anggaran dari bantuan sejenis. Penentuan jumlah lokasi penerima bantuan dilakukan secara merata melalui metode perangkingan terhadap banyaknya jumlah keluarga miskin dan rumah tidak layak huni, sehingga jumlah penerima bantuan pada setiap daerah berbeda-beda tergantung dari banyak tidaknya rumah tidak layak huni yang dimiliki rumah tangga miskin pada daerah yang bersangkutan.

## 5. Responsivitas

“Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria resposivitas penting karena analis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn 2000 : 437).

Keberhasilan kebijakan pada kriteria responsivitas dilihat dari sejauhmana respon masyarakat menanggapi pelaksanaan bantuan

setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat mengenai dampak suatu kebijakan setelah dilaksanakan yang dalam bentuk positif berupa dukungan ataupun wujud negatif berupa penolakan.

Hasil penelitian pada kriteria responsivitas menunjukkan bahwa selama pelaksanaan bantuan berwujud negatif dengan munculnya penolakan dari masyarakat. Penolakan yang terjadi menurut hasil pelaksanaan bantuan disebabkan oleh tidak adanya kegiatan gotong-royong antar masyarakat. Pelaksanaan bantuan hanya dikerjakan oleh masyarakat penerima bantuan beserta keluarganya. Sedangkan partisipasi masyarakat sekitar dalam membantu pelaksanaan bantuan tidak ada. Antusiasme masyarakat tinggi hanya dalam pengajuan diri sebagai calon penerima bantuan akan tetapi ketika dirasa tidak menguntungkan maka masyarakat enggan untuk melakukan atau membantu masyarakat penerima bantuan selama tidak menguntungkan mereka secara langsung. Meskipun terjadi penolakan dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaan bantuan dengan tidak adanya partisipasi masyarakat yang terjadi akan tetapi

masyarakat tetap merasa puas dan senang dengan hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin karena merasa diperhatikan kesejahteraannya.

Jadi hasil pelaksanaan bantuan dilihat dari kriteria responsivitas belum bisa dikatakan baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan bantuan masih terjadi penolakan dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun.

## **6. Ketepatan**

“Ketepatan (*Appropriateness*), kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut” (Dunn 2000:438).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada hasil pelaksanaan dilihat dari kriteria perataan belum dapat dikatakan baik. Meskipun dalam penentuan calon penerima bantuan sudah mengacu pada data yang dimiliki pemerintah desa serta di dasarkan pada 3 aspek yang menjadi pertimbangan penentuan kelayakan mendapat

bantuan yaitu kondisi lantai, dinding dan atap. Akan tetapi masih ditemukan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan secara mendesak belum segera mendapatkan bantuan dikarenakan tidak adanya dana swadaya yang dimiliki. Hal lain yang menunjukkan belum berhasilnya pelaksanaan bantuan pada kriteria ketepatan dilihat dari kecilnya penurunan angka keluarga pra sejahtera meskipun *output* berupa rumah layak huni sudah mencapai jumlah yang baik. Hal ini memberi gambaran bahwa pelaksanaan bantuan pada kriteria ketepatan belum tepat sasaran.

## **B. Dampak Sosial Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun**

### **1. Dampak Individu**

Dampak individu akan melihat sejauhmana pengaruh bantuan perumahan masyarakat miskin terhadap masyarakat Kecamatan Prembun. Dampak individu memiliki beberapa aspek yaitu biologis (kesehatan), psikis (mental), lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pada dampak individu dari 5 aspek yang menjadi sorotan dalam pembahasan dampak sosial yang terjadi, ketiga aspek memiliki dampak positif sedangkan dua lainnya justru mengarah pada dampak negatif. Aspek

yang berdampak positif diantaranya yaitu aspek kesehatan, aspek lingkungan serta aspek ekonomi.

Hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun telah mampu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dikarenakan lingkungan rumah yang semula kumuh dan tidak tertata dengan baik setelah dilakukan perbaikan rumah menjadi lebih tertata dan sehat. Kondisi peningkatan pada kualitas kesehatan ini akhirnya secara perlahan telah berdampak pada perubahan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung menekan biaya hidup penerima bantuan utamanya pada biaya perbaikan rumah karena huniannya telah dalam kondisi layak huni.

Dampak negatif justru ditunjukkan pada aspek psikis dan aspek sosial serta personal. Hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin justru memunculkan fenomena sikap ketergantungan masyarakat akan bantuan pemerintah yang tinggi. Hal ini ternyata secara tidak langsung dipengaruhi oleh banyaknya bantuan yang bersifat secara langsung kepada masyarakat sehingga telah merubah mental masyarakat menjadi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Akibatnya banyak

masyarakat yang justru menunggu mendapat bantuan hingga rumah yang bersangkutan rusak parah dengan harapan masuk daftar penerima bantuan, padahal jika ditelusuri lebih lanjut masyarakat yang bersangkutan dalam kondisi yang mampu untuk melakukan perbaikan rumah secara mandiri.

Aspek sosial serta personal juga memunculkan dampak negatif. Berdasarkan hasil penelitian hadirnya pelaksanaan bantuan sempat menimbulkan kecemburuan sosial antar sesama calon penerima bantuan dikarenakan masyarakat yang sudah masuk daftar calon penerima bantuan tidak kunjung mendapatkan bantuan.

## **2. Dampak Organisasional**

Dampak organisasional akan melihat sejauhmana suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung berupa terganggu atau terbantunya organisasi dalam mencapai tujuannya. Dampak tidak langsung misalnya melalui peningkatan semangat kerja organisasi.

Hasil pelaksanaan bantuan pada dampak organisasional terhadap tim pelaksana dan penerima bantuan menunjukkan dampak yang baik. Pada tim pelaksana bantuan terjadi

peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni. Hal positif lain yang ditunjukkan oleh tim pelaksana bantuan yaitu munculnya sikap inisiatif tim pelaksana bantuan dalam mengatasi anggaran yang terbatas melalui gagasan dalam menentukan bahan baku bangunan dengan kualitas baik harga terjangkau.

Selanjutnya dampak sosial yang terjadi terhadap kelompok penerima bantuan yaitu hadirnya bantuan mampu mendorong masyarakat penerima bantuan untuk memperbaiki kualitas huniannya meskipun hal ini tidak berdampak pada kelompok masyarakat bukan penerima bantuan.

Berdasarkan fenomena tersebut jelas adanya bahwa dampak sosial pada unit dampak organisasional sudah baik terutama pada dampak secara langsung karena seperti yang dijelaskan pada dampak organisasional bahwa dampak secara langsung terhadap unit organisasional berupa terganggu atau terbantunya organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun berhasil membantu pencapaian tujuan organisasi baik tim pelaksana bantuan berupa peningkatan kompetensi

pemerintah desa dalam menghadapi rumah tidak layak huni serta peningkatan kelompok masyarakat karena hadirnya bantuan telah mampu mendorong masyarakat penerima bantuan untuk memperbaiki huniannya.

### **3. Dampak Masyarakat**

Masyarakat bukanlah unit sosial yang *goal-oriented* seperti organisasi. Masyarakat adalah suatu unit yang melayani para anggotanya, jika masyarakat dikatakan mempunyai tujuan tertentu, maka tujuannya adalah melayani individu-individu anggotanya dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauhmana kebijakan mampu mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya dan sebagai penampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanya merupakan output. Sementara proses dan konversi dalam sistem ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah sumber daya, guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

Hasil penelitian pada pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun menunjukkan

bahwa pelaksanaan bantuan pada unit dampak masyarakat bersifat negatif. Hal ini dapat dilihat dari tidak tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi rumah tidak layak huni. Masyarakat belum memprioritaskan rumah sehat layak huni sebagai kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi. Hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun berdasarkan data hasil pelaksanaan bantuan juga tidak menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya seperti membantu dalam pelaksanaan bantuan atau sekedar mengusulkan tetangga mereka yang memiliki kondisi rumah tidak layak huni agar segera mendapatkan bantuan. Minimnya kepedulian masyarakat dalam mengatasi kondisi rumah tidak layak huni di sekitarnya menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan sebelum dan sesudah dilakukan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun terhadap dampak masyarakat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan bantuan tersebut tentu dapat dipahami bahwa bantuan perumahan masyarakat miskin terhadap dampak masyarakat masih belum baik dikarenakan kebijakan dikatakan baik jika mampu mempengaruhi kapasitas masyarakat

dalam melayani anggotanya. Akan tetapi jika berkaca pada fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun hal ini belum mampu diwujudkan secara baik.

#### **4. Dampak Lembaga dan Sistem Sosial**

Dampak lembaga dan sistem sosial akan melihat sejauhmana instansi pelaksana kegiatan dan masyarakat merasakan dampak dari hadirnya Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun. Dampak yang diteliti diantaranya fokus pada hubungan antar masyarakat dengan pemerintah dan realitas sosial yang terjadi dengan hadirnya Bantuan Perumahan Masyarakat Miskin di Kecamatan Prembun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat sempat menimbulkan kekecewaan masyarakat pada pihak pemerintah disebabkan permohonan kepada pemerintah desa agar mendapatkan bantuan tidak diberikan oleh pihak pemerintah.

Sedangkan realitas sosial yang terjadi terhadap hubungan antar masyarakat tidak berdampak. Hadirnya bantuan tidak berdampak pada perubahan interaksi sosial antar

masyarakat. Sikap gotong-royong antar masyarakat masih terjaga. Akan tetapi hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun tidak berdampak pada peningkatan kegiatan gotong-royong antar masyarakat. Pelaksanaan bantuan yang menghendaki adanya gotong-royong antar masyarakat nyatanya justru tidak dilakukan secara gotong-royong.

Kesimpulan pada unit dampak lembaga dan sistem sosial menunjukkan bahwa hadirnya bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun tidak berpengaruh terhadap lembaga dan sistem sosial di masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun;

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin dinilai masih banyak kekurangan. Tiga dari enam kriteria yang digunakan masih belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini berakibat pada hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun belum optimal.

Dampak sosial bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun;

Peneliti dalam mengevaluasi kebijakan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun fokus pada dampak sosial yang ditimbulkan. Dampak sosial yang dimaksud dilihat dari unit-unit sosial pedampak yang terdiri atas dampak individu, dampak organisasional, dampak masyarakat serta dampak lembaga dan sistem sosial.

Berdasarkan data hasil pelaksanaan bantuan disimpulkan bahwa dampak sosial yang masih kurang yaitu (1) Dampak individu utamanya pada aspek psikis, sosial serta personal yang justru menimbulkan ketergantungan akan bantuan pemerintah dan kecemburuan antar sesama calon penerima bantuan, (2) Dampak masyarakat yang justru tidak menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan rumah tidak layak huni. Sedangkan untuk dampak organisasional berdampak positif ditandai dengan adanya peningkatan kompetensi pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni. Pada unit dampak lembaga dan sistem sosial hadirnya bantuan tidak berdampak pada interaksi sosial antar masyarakat.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan hasil pelaksanaan bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun dilakukan dengan meningkatkan kriteria yang masih kurang:
  - a. Kriteria kecukupan dilakukan dengan pemberian buku pedoman pelaksanaan bantuan dan ketentuan dalam memberikan arahan tentang pentingnya fungsi dan standar syarat hunian sehat layak huni.
  - b. Kriteria responsivitas dilakukan dengan membentuk sistem pelaksanaan bantuan di masyarakat secara berkelompok, evaluasi rutin oleh pemerintah kabupaten.
  - c. Kriteria ketepatan dapat dilakukan dengan melakukan penggalangan dana melalui pembentukan kelompok di masyarakat dengan membuat suatu produk yang nantinya uang hasil penjualan digunakan untuk menambah swadaya masyarakat utamanya bagi masyarakat yang tidak memiliki swadaya bantuan dan memiliki kondisi rumah dengan tingkat keparahan tinggi.
2. Meningkatkan dampak sosial bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun dilakukan dengan mengatasi dampak negatif yang terjadi pada unit-unit sosial pedampak:
  - a. Dampak individu pada aspek psikis dan sosial serta personal dapat dilakukan dengan memanfaatkan organisasi terkecil di masyarakat seperti RT/RW dalam menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa bantuan perumahan masyarakat miskin bukan bantuan yang dapat diterima semua orang karena dalam regulasi sudah dijelaskan mengenai kriteria-kriteria yang berhak mendapatkan bantuan.
  - b. Dampak masyarakat dapat dilakukan melalui pembuatan sistem penjadwalan dan kelompok kerja yang terdiri atas masyarakat sekitar dan masyarakat penerima bantuan. Sehingga nantinya akan tumbuh sikap inisiatif serta peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi rumah tidak layak huni dan secara perlahan diharapkan mampu menumbuhkan sikap kemandirian masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, Totok., dan Soebiato, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Nurhadi, (2007). *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wahab, Abdul Solichin. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### Sumber Lain

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah